

BAB 1:

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dilema Industri Kelapa Sawit Indonesia dari Sudut Pandang Hubungan Internasional menjadi penting untuk diteliti secara lebih mendalam karena industri kelapa sawit Indonesia memiliki dampak global yang signifikan, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Konflik terkait produksi dan perdagangan kelapa sawit sering kali menjadi sorotan internasional, dengan isu-isu lingkungan, seperti deforestasi, memainkan peran kunci. Dalam konteks hubungan internasional, pemahaman atas aspek diplomasi dan perjanjian perdagangan, seperti *Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*, memperlihatkan kompleksitas dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan internasional terkait industri kelapa sawit. Selain itu, konflik dengan organisasi internasional dan NGO serta dinamika ekonomi global menjadi faktor-faktor penting yang perlu dianalisis untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam mengelola industri kelapa sawitnya di tingkat internasional.

Industri kelapa sawit adalah lini bisnis lokal yang berkontribusi secara masif terhadap perekonomian Indonesia. Industri ini menyumbang angka yang besar untuk kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan juga jumlah ekspor ke negara luar. Kontribusi industri kelapa sawit Indonesia memiliki peningkatan yang signifikan

per tahunnya, dimana sektor ini tercatat telah memberikan kontribusi sebesar 2,99% terhadap PDB Indonesia atau sekitar Rp. 338,8 triliun di tahun 2020. Dari data ekspor, industri kelapa sawit menjadi sektor ekspor terbesar pada tahun 2020. Ekspor minyak kelapa sawit (CPO) mencapai 28,4 juta ton, dengan negara-negara tujuan seperti Uni Eropa, India, dan Tiongkok (Irawan & Soesilo, 2021). Karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian negara ini lah yang membuat industri kelapa sawit seakan menjadi ‘anak emas’ dari pemerintah Indonesia dan menjadi prioritas utama diplomasi luar negeri Indonesia.

Selain berkontribusi dalam ekonomi negara secara general, industri kelapa sawit juga dianggap banyak membantu kehidupan para petani kelapa sawit dan membuka lapangan pekerjaan secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakekatnya, Pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan inisiatif pembangunan ekonomi yang difokuskan pada pengembangan wilayah pedesaan. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan penduduk di daerah pedesaan. Proses pembangunan kawasan perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, telah memberikan dukungan signifikan kepada masyarakat pedesaan dengan memberikan akses pada berbagai sumber pendapatan baru. Sebelum adanya perkebunan di desa, pendapatan masyarakat cenderung seragam, bergantung sepenuhnya pada sektor pertanian primer atau memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka tanpa menerapkan teknologi atau strategi untuk meningkatkan nilai tambah dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Data lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di wilayah pedesaan menggunakan kegiatan teknologi yang sangat

seederhana dan tidak ada perubahan signifikan dari apa yang sudah dilakukan sejak dulu. Mereka hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa memiliki rencana pengembangan usaha yang jelas (Ridwan, 2007).

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di pedesaan memiliki potensi untuk meningkatkan pergerakan penduduk di area tersebut dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Dampak positifnya termasuk peningkatan kapasitas beli penduduk pedesaan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah mereka. Rata-rata pengeluaran para petani setiap bulannya untuk kebutuhan rumah tangga adalah sekitar Rp. 1.183.288. Pengusaha perkebunan kelapa sawit yang mengandalkan manual dan melakukan usahanya di daerah pedesaan membutuhkan biaya yang besar untuk tenaga kerja langsung dan tenaga teknis di lapangan. Walaupun biayanya besar untuk pengusaha sawit dengan teknik manual, hal ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang di wilayah tersebut melalui tumbuhnya perdagangan dan jasa (Irawan & Soesilo, 2021). Aktivitas perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan efek pengganda, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis. Peluang-peluang bisnis ini dapat menjadi tambahan sumber penghasilan bagi penduduk, asalkan mereka mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi tersebut menjadi usaha yang konkret. Kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengenali dan mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga peluang tersebut dapat diubah menjadi usaha yang dapat dijalankan dengan memberikan keuntungan. Efek pengganda diperoleh dari seberapa besar persentase pendapatan petani kelapa

sawit yang diinvestasikan kembali dalam wilayah setempat dan sejauh mana kebutuhan perkebunan kelapa sawit dapat dipenuhi oleh pelaku lokal. Setiap investasi yang dilakukan oleh petani kelapa sawit di wilayahnya berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar melalui berbagai bentuk usaha dan jasa (Irawan & Soesilo, 2021).

Menurut Kementerian Pertanian Indonesia, petani kelapa sawit rata-rata mendapatkan pendapatan bersih sekitar Rp. 2,2 juta per hektar per bulannya. Angka ini cukup signifikan apabila dibandingkan dengan pendapatan petani karet yang totalnya adalah sekitar Rp. 766 ribu per hektar per bulan. Walaupun begitu, pendapatan para petani kelapa sawit tidak bisa dipukul rata karena banyak petani yang mendapatkan perlakuan tidak adil di lapangan. Distribusi aktor dari industri kelapa sawit cenderung masih menguntungkan perusahaan besar dibanding petani kecil. Hal ini diakibatkan sebagian besar lahan kelapa sawit Indonesia dimiliki oleh perusahaan besar dan dikelola dengan skala ekonomi besar, seperti misalnya penggunaan teknologi yang canggih serta sistem manajemen yang terpadu. Sebaliknya, para petani kecil memiliki lahan serta modal dan teknologi yang terbatas untuk mampu bersaing atau menjadi *partner* dari perusahaan-perusahaan besar. Para petani kecil juga sering menjadi korban dari praktik-praktik tidak adil, seperti harga CPO yang rendah, bunga pinjaman tinggi, dan kontrak yang lebih condong menguntungkan perusahaan besar. Ketidakseimbangan antara segmen hulu dan hilir dalam industri kelapa sawit menjadi permasalahan umum di Indonesia. Komoditas kelapa sawit memberikan keuntungan yang signifikan bagi pihak hilir, seperti pengusaha, perusahaan ekspor besar, dan distributor produk turunan dari CPO. Keuntungan yang diperoleh oleh kelompok ini

jauh melampaui hasil yang dinikmati oleh petani di segmen hulu (Syarif, 2018). Pentingnya pencapaian kesetaraan dalam hal keuntungan sepanjang rantai pasok dari hulu hingga hilir tergambar, karena kegagalan atau kebangkrutan di salah satu tahap dapat berdampak pada seluruh industri. Petani skala kecil dan perusahaan besar saling bergantung dalam seluruh proses pertanian kelapa sawit hingga ke tahap ekspor.

Permasalahan dalam jalur rantai pasok hulu ke hilir bukanlah satu-satunya permasalahan yang berputar dalam industri kelapa sawit. Permasalahan lingkungan merupakan hal yang sudah lama berlangsung dan banyak menjadi kontroversi antara berbagai pihak. Pertanian kelapa sawit dianggap menjadi salah satu alasan utama dari deforestasi di Indonesia, dimana banyak hutan primer yang dulunya merupakan suaka dari keanekaragaman hayati dan spesies yang dilindungi dijadikan perkebunan kelapa sawit. Bukan hanya dari deforestasi, Kesulitan juga timbul dari proses pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan banyak sisa atau residu (Natashya, 2019). Limbah cair dari proses pengolahan kelapa sawit bisa mengakibatkan pencemaran dan mengurangi mikroorganisme di perairan, serta membuat air menjadi beracun. Sedangkan limbah padat mengandung 45% selulosa dan 65% hemiselulosa yang menghasilkan bau tidak sedap. Apabila dilihat dari penilaian siklus hidup atau *life cycle assessment* (LCA) industri kelapa sawit yang bisa digunakan sebagai penilaian dampak negatif yang dihasilkan, setiap tahap pengolahan kelapa sawit memiliki efek negatif kepada lingkungan. Tahap-tahap pengolahannya mencakup tahap konstruksi, operasi dan produksi, serta pasca operasi. Beberapa organisasi lingkungan hidup yang banyak mengkritik industri kelapa sawit karena efek negatif pada lingkungan yang

dihasilkannya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Sawit Watch, Greenpeace, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) (Natashya, 2019).

Secara keseluruhan, isu yang mencakup dampak negatif kelapa sawit terhadap lingkungan di Indonesia menjadi isu penting terhadap seluruh tingkatan di dunia. Baik itu tingkat domestik, regional, internasional, dan bahkan global. Isu permasalahan sawit di Indonesia seringkali menjadi perhatian di seluruh tingkatan karena dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada tingkat domestik, isu kelapa sawit dan lingkungan mulai diperhatikan oleh masyarakat terutama pada aktivis lingkungan dan menuntut pemerintah serta perusahaan pengolah dan pengeksport sawit untuk memperbaiki praktik produksinya. Pemerintah Indonesia sendiri telah mencoba untuk menerapkan beberapa kebijakan agar produksi sawit tidak memberikan dampak buruk yang massif terhadap lingkungan (Greenpeace, 2021b). Isu sawit dan lingkungan juga diperhatikan pada tingkat regional atau ASEAN, karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara-negara yang menjadi pengeksport minyak kelapa sawit terbesar dunia. Isu ini menjadi tanggung jawab regional karena negara-negara lainnya juga memerhatikan isu kelapa sawit terhadap lingkungan yang menjadikan isu ini telah mencapai tingkat internasional. Beberapa negara seperti Uni Eropa telah mengeluarkan aturan yang ketat terhadap penggunaan kelapa sawit pada produk-produk mereka dan mulai mengurangi impor minyak kelapa sawit secara signifikan. Isu kelapa sawit dan lingkungan juga dapat dilihat dalam lingkup global. Indonesia yang menjadi produsen utama kelapa sawit seringkali dianggap sebagai penyebab utama dari deforestasi dan kehilangan habitat satwa liar, dimana dampak

tersebut dianggap memberikan efek yang buruk bagi iklim dan keanekaragaman hayati global (Greenpeace, 2021a).

Menurut hasil data yang dilaporkan oleh Greenpeace, di beberapa kawasan hutan, baik di dalam maupun luar batas konsesi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, terdapat tanaman sawit yang ditanam secara ilegal. Wilayah konsesi sendiri merupakan wilayah yang sudah memiliki izin untuk dibangun perkebunan atau industri lainnya. Mayoritas kebun kelapa sawit yang ditanam secara ilegal di dalam batas konsesi berasal dari perusahaan perkebunan, mencakup 86% dari total luas lahan seluas 975.281 hektar yang dianggap sebagai kebun kelapa sawit ilegal. Di sisi lain, di luar batas konsesi, perusahaan perkebunan hanya mencakup 33%, sementara kebun milik masyarakat sendiri mencapai dua kali lipat dari jumlah tersebut. Luas keseluruhannya mencapai 2.143.523 hektar. Seiring dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, perusahaan kini memiliki kemampuan untuk melegalkan kebun kelapa sawit yang sebelumnya ditanam secara ilegal kawasan hutan yang berlokasi di luar batas konsesi, bahkan secara retroaktif (Greenpeace, 2021b).

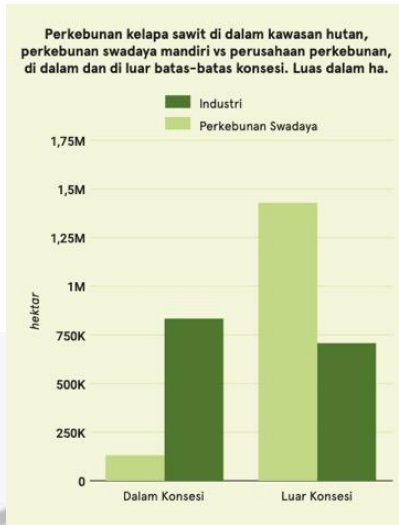


Diagram 1: Jumlah perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam dan di luar wilayah konsesi

Sumber: Greenpeace

Setelah reformasi desentralisasi, terdapat 191 pemilihan umum di kabupaten dan provinsi selama empat bulan pada tahun 2005. Proses perizinan perkebunan meliputi persetujuan dari bupati untuk izin lokasi dan izin usaha, serta rekomendasi gubernur untuk Pendaftaran pembebasan atau pertukaran kawasan hutan perlu dilakukan sebelum diajukan kepada kementerian. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jawa Tengah, seperti Save Our Borneo, mencatat bahwa rekomendasi untuk melepas kawasan hutan seringkali diberikan ketika politisi membutuhkan dukungan atau sedang menggalang dana untuk kampanye (Greenpeace, 2021b). Pada tahun 2010, Save Our Borneo melaporkan bahwa gubernur Kalimantan Tengah menandatangani 77 rekomendasi pembebasan kawasan hutan dan 125 rekomendasi pertukaran kawasan hutan hanya beberapa hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran kandidat gubernur setelah beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu penyumbang ekonomi terbesar bagi negara,

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan industri kelapa sawit tidak luput dari kepentingan politik. Di samping keberadaan perkebunan kelapa sawit ilegal, tercatat sekitar 90.200 hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di dalam kawasan hutan yang diidentifikasi sebagai area konservasi. Dampaknya melibatkan 24 provinsi di seluruh Indonesia, dengan provinsi Riau memiliki wilayah konservasi terluas mencapai 38.827 hektar. Mayoritas perusahaan perkebunan yang beroperasi di dalam kawasan konservasi terdapat di Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, di wilayah lain seperti sepanjang Sumatera, terdapat proporsi yang lebih besar dari perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat di dalam kawasan konservasi. Di bawah ini adalah daftar perusahaan yang memiliki luas perkebunan terbesar di wilayah konservasi (Greenpeace, 2021b).

No	Perusahaan - Nama Kelompok	Area Tanam di Wilayah Konservasi (ha)
1	PT Sakti Mait Jaya Langit - Mentari	4.490
2	PT Sinar Kencana Inti Perkasa - Sinar Mas (GAR)	1.766
3	PT Berkat Sawit Sejati - Musim Mas	1.466
4	PT Inti Gerak Maju -	828
5	PT Kaliau Mas Perkasa - Darmex Agro	770
6	PT Inti Indosawit Subur - Royal Golden Eagle (RGE)/Asian Agri	683
7	PT Kahayan Agro Lestari - Fri-EI	650
8	PT Suryamas Cipta Perkasa - Best Agro Plantation	376
9	PT Mandiri Adi Jaya -	309
10	Koperasi Unit Desa (KUD) Lubuk Indah -	247

Diagram 2: 10 terbesar perusahaan dengan perkebunan kelapa sawit dalam wilayah konservasi (luas wilayah dalam ha)

Sumber: Greenpeace

Besarnya perkebunan kelapa sawit ilegal dan hutan sawit di daerah konservasi menjadi masalah yang serius karena perkebunan kelapa sawit sedang mengancam kelangsungan hidup beberapa spesies fauna di Indonesia yang hampir punah. Seperti harimau, orangutan, dan gajah. Ketika hutan dihancurkan untuk memberikan tempat bagi perkebunan kelapa sawit, banyak spesies yang kehilangan tempat tinggal mereka secara langsung. Selain luas total kehilangan habitat, fragmentasi habitat juga perlu dipertimbangkan. Dengan perlahan, perkebunan kelapa sawit merusak hutan dengan memotong petak-petak hutan yang tadinya berdekatan. Hal ini dapat menyebabkan kematian banyak spesies tumbuhan dan binatang secara perlahan-perlahan.

Fragmentasi habitat ini terjadi karena konektivitas antara sisa-sisa hutan terganggu dan hutan yang tidak ditebang yang berada di sebelah perkebunan kelapa sawit juga memiliki perubahan, seperti peningkatan penetrasi cahaya, penyebaran spesies yang

invasive, perubahan mikrohabitat, dan kerentanan terhadap kebakaran. Ekspansi perkebunan kelapa sawit ke habitat spesies megafauna juga menyebabkan berbagai peningkatan konflik antara para satwa dan manusia yang bisa menyebabkan cedera atau bahkan kematian untuk kedua pihak. Disrupsi ekologis juga terjadi Ketika perkebunan kelapa sawit merusak kawasan hutan (Greenpeace, 2021a).

Sebagai upaya untuk melakukan proses pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan, Indonesia lewat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menjadi salah satu anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di tahun 2008. RSPO adalah badan yang didirikan tahun 2004 oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan industri kelapa sawit. Keanggotaannya mulai dari produsen kelapa sawit, para pemasok, perusahaan pengolah, perusahaan makanan dan produk-produk berbahan kelapa sawit lainnya, bank, dan organisasi lingkungan. RSPO digunakan sebagai wadah untuk mempromosikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan sosial atau masyarakat lokal. Setelah keanggotaan Indonesia selama 10 tahun di RSPO, akhirnya Indonesia memutuskan untuk keluar dari RSPO pada tahun 2018 dikarenakan sanksi yang diberikan kepada dua perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia: Felda Global Ventures dan IOI Group yang dituduh melanggar hak asasi manusia dan juga melakukan deforestasi. Keluarnya Indonesia dari RSPO ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi kedaulatan negara dan masyarakat adat. Walaupun telah keluar dari RSPO, Indonesia memiliki *platform sustainability* untuk industri kelapa sawit yang bernama Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO adalah kebijakan Kementerian Pertanian untuk

meningkatkan daya saing CPO Indonesia di pasar dunia, sekaligus berpartisipasi dalam komitmen pemerintah untuk memberi perhatian kepada masalah lingkungan (Natashya, 2019).

Keluarnya Indonesia dari RSPO dianggap sebagai momentum untuk fokus kepada ISPO dan menjadikannya sebagai sertifikasi yang diakui dunia. Keluarnya Indonesia dari RSPO banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan tindakan Indonesia dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya untuk mempromosikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Kebijakan ISPO memiliki tujuan untuk meningkatkan kepedulian pihak-pihak yang tergabung dalam industri kelapa sawit Keseluruhan kebutuhan untuk menghasilkan kelapa sawit secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia, dan mendukung tekad Indonesia dalam melestarikan alam dan menjaga lingkungan. ISPO sendiri merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati oleh para pengusaha kelapa sawit sebagai bagian dari *corporate social responsibility* (CSR). CSR muncul dari tuntutan sosial dari masyarakat sebagai refleksi dari tanggung jawab perusahaan pada seluruh *stakeholders* utamanya. Mereka adalah para pekerja, masyarakat sekitar, investor, pembeli, pemerintah, dan kelangsungan lingkungan hidup bagi para generasi penerus. CSR sendiri merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh perusahaan dalam skala global. Apabila kewajiban-kewajiban yang ada sudah dipenuhi, maka perusahaan sudah bisa dianggap tidak merugikan kepentingan para *stakeholders* dan telah melakukan kegiatan produksinya secara berkelanjutan (Greenpeace, 2021a).

Permasalahan penelitian yang akan diangkat dalam thesis ini adalah mengenai alasan industri kelapa sawit Indonesia mengalami dilemma dalam perdagangan internasional, serta apa saja langkah diplomasi lingkungan yang ditempuh oleh Indonesia untuk menciptakan jalan tengah bagi industri kelapa sawit. Permasalahan dalam industri kelapa sawit seringkali luput dari perhatian pemerintah karena adanya kontribusi besar dalam ekonomi negara yang diberikan oleh industri ini, padahal sebenarnya masih banyak permasalahan yang dimana pemerintah tidak boleh menutup mata karena memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan dan juga sosial. Walaupun Indonesia telah memiliki ISPO yang menjadi aturan resmi bagi para penggerak industri kelapa sawit, pada implementasinya masih terdapat peraturan-peraturan yang kurang tegas terhadap perusahaan yang menyalahi aturan.

Permasalahan dalam industri kelapa sawit juga seringkali menjadi kontroversi karena banyak pihak yang menganggap bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan pengolah kelapa sawit tidak lah memberikan efek negatif terhadap lingkungan dan sosial, justru industri kelapa sawit menciptakan banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat. Keuntungan-keuntungan tersebut merupakan hal-hal yang terlihat di permukaan saja. Walaupun industri kelapa sawit memberikan banyak dampak positif terutama untuk negara, masih banyak praktik-praktik menyeleweng di baliknya yang harus diatasi oleh pemerintah secara lebih tegas lagi. Kesalah pahaman yang ingin diluruskan dari thesis ini adalah usaha masyarakat dan penggiat lingkungan serta kemanusiaan untuk mendorong pemerintah dan perusahaan kelapa sawit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengimplementasikan peraturan secara

lebih tegas bukan lah untuk menyudutkan para pengusaha sawit ataupun menghancurkan industri yang menjadi salah satu penyumbang utama dalam ekonomi negara, namun justru untuk mencari titik tengah agar seluruh pihak bisa mendapatkan efek positif secara maksimal. Pada akhirnya seluruh keuntungan yang didapatkan oleh negara akan kembali kepada masyarakatnya, sehingga kebijakan apapun yang diambil oleh negara harus lah menempatkan seluruh kepentingan masyarakat di urutan pertama secara adil.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa industri kelapa sawit Indonesia mengalami dilema dalam perdagangan internasional?
2. Apa saja langkah yang ditempuh oleh Indonesia untuk menciptakan jalan tengah bagi industri kelapa sawit?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang dilema industri kelapa sawit Indonesia dalam perdagangan internasional dan mengidentifikasi langkah-langkah diplomasi lingkungan apa saja yang bisa diambil oleh Indonesia untuk menciptakan jalan tengah bagi industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri yang memberikan dampak terbesar bagi ekonomi Indonesia, sehingga industri dengan peluang perkembangan sangat besar ini harus lah didasari dengan aturan-aturan

tegas yang memberikan keuntungan tidak hanya bagi negara secara general atau kepada perusahaan besar, tetapi juga bagi para petani kecil dan masyarakat sipil lainnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efek positif dan negatif dari industri kelapa sawit di Indonesia, yang memunculkan dilema dalam hubungan internasional. Pemahaman yang mendalam mengenai dilema dalam industri sawit di Indonesia dapat membantu untuk melihat hal-hal apa saja yang selama ini terlewatkan oleh pemerintah dalam meregulasi produksi sawit Indonesia dan mencari jalan tengah untuk bisa menyeimbangkan antara dampak positif dan negatif yang dihasilkan tanpa merugikan salah satu pihak yang terlibat. Penelitian ini juga akan memberikan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pihak yang terlibat dalam industri kelapa sawit untuk melihat kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

Menyelesaikan penelitian ini juga akan memenuhi kebutuhan penulis sebagai persyaratan kelulusan untuk gelar Magister Hubungan Internasional di Universitas Pelita Harapan.

1.5. Struktur Penelitian

Bab 1: PENDAHULUAN

Bab ini memperkenalkan topik penelitian dengan memberikan gambaran umum tentang latar belakang dilemma industri kelapa sawit Indonesia dari sudut pandang hubungan internasional. Pada bab ini terdapat latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan struktur penelitian. Dalam bab ini, akan diperkenalkan topik penelitian yang berkaitan dengan industri kelapa sawit di Indonesia melalui perspektif hubungan internasional. Industri kelapa sawit adalah salah satu sektor utama dalam perkembangan ekonomi Indonesia dan memiliki dampak yang signifikan dalam konteks global. Oleh karena itu, penting untuk memahami dilema yang terkait dengan industri ini dari sudut pandang hubungan internasional.

Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini menyajikan tinjauan komprehensif terhadap penelitian dan literatur yang ada tentang topik ini. Bab ini akan menjelajahi studi dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan Industri kelapa sawit di Indonesia beserta dilemanya, dilihat dari sudut pandang hubungan internasional. Teori neoliberalisme dalam hubungan internasional juga akan diperkenalkan dalam bab ini sebagai kerangka teoritis utama yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Teori ini akan membantu menjelaskan bagaimana hubungan internasional, khususnya dalam konteks industri

kelapa sawit Indonesia, dapat dipahami melalui perspektif neoliberalisme. Pengenalan teori ini akan memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan interpretasi fenomena yang akan diteliti.

Bab 3: METODOLOGI

Bab ini membahas metodologi penelitian untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, untuk menunjukkan validitas dan reliabilitas hasil yang diperoleh, serta untuk memperlihatkan metode pengumpulan data dan analisis yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Metodologi penelitian ini akan membantu memastikan keabsahan dan keandalan hasil penelitian yang diperoleh.

Bab 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merangkum temuan dan hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian. Pada bagian ini, akan diungkapkan dan dianalisis temuan serta hasil yang muncul dari penelitian ini. Hasil dan temuan tersebut bukan hanya hasil dari analisis data yang telah dilakukan, melainkan juga mencerminkan informasi baru yang terungkap dalam konteks Dilema Industri Kelapa Sawit Indonesia dari Sudut Pandang Hubungan Internasional. Pemaparan ini bertujuan memberikan wawasan mendalam mengenai industri kelapa sawit di Indonesia serta dilema yang dihadapinya. Informasi

ini menjadi kunci untuk memahami kompleksitas industri kelapa sawit di Indonesia, dampak hubungan internasionalnya, dan memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan guna mendorong keberlanjutan sektor ini. Oleh karena itu, bagian ini akan menyajikan hasil dan temuan penelitian sebagai hasil dari proses penelitian yang telah dilalui, memberikan kontribusi yang berharga untuk memahami dilema dalam industri kelapa sawit di Indonesia.

Bab 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam tentang dilema industri kelapa sawit Indonesia, bab ini mengakhiri tesis dengan merangkum temuan-temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk penelitian masa depan. Dengan mengacu pada berbagai sumber data, bab ini memberikan gambaran komprehensif tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam industri kelapa sawit di Indonesia dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di masa mendatang. Secara keseluruhan, rekomendasi yang diungkapkan dalam bab ini memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, sarjana, dan praktisi yang tertarik untuk memahami tentang permasalahan dalam industri kelapa sawit Indonesia dan hubungannya dengan dunia internasional.